

Tinjauan Mata Kuliah

Pembahasan Ilmu Perundang-undangan memberikan pemahaman ilmu pengetahuan perundang-undangan yang dimulai dari sejarah dan latar belakang, lalu pembahasan secara teori mengenai norma hukum negara, dan implementasi sistem norma hukum dan perundang-undangan di Indonesia hingga proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan mengenai Ilmu Perundang-Undangan juga untuk memahami ilmu pengetahuan perundang-undangan secara teori juga praktik tentang sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dan mampu menyusun peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan meliputi pokok-pokok bahasan yang dikaji secara terperinci sebagai berikut.

- Modul 1 : membahas tentang pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan yang meliputi peristilahan ilmu perundang-undangan, pembentukan norma hukum, dan ruang lingkup ilmu perundang-undangan.
- Modul 2 : membahas tentang norma dalam masyarakat, yang meliputi beberapa norma dalam masyarakat, kemudian sifat, karakter, wujud, serta daya laku dan daya guna norma.
- Modul 3 : membahas tentang norma hukum dalam negara, yang meliputi tata susunan norma dan karakteristik norma hukum negara.
- Modul 4 : membahas sistem norma hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi hubungan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta sistem norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- Modul 5 : membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
- Modul 6 : membahas tentang lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Modul 7 : membahas mengenai jenis, fungsi, dan materi muatan perundang-undangan.
- Modul 8 : membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah dan proses pembentukan undang-undang dan penyusunan rancangan undang-undang di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah.
- Modul 9 : membahas mengenai format peraturan perundang-undangan dan penyusunan ketentuan materi.

Peta Kompetensi
Ilmu Perundang-undangan/HKUM4403/3 sks

